

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF,
LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Akuntansi



Oleh :

LARASATI EKA PUTRI

2014310114

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

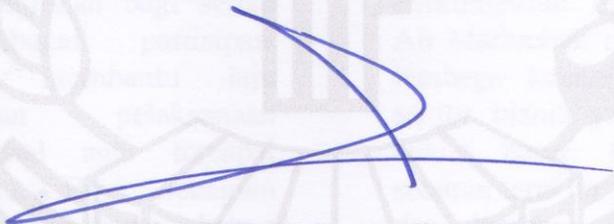
PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Larasati Eka Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 1 November 1996
NIM : 2014310114
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Preferensi Risiko Eksekutif, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

Disetujui dan diterima baik oleh :

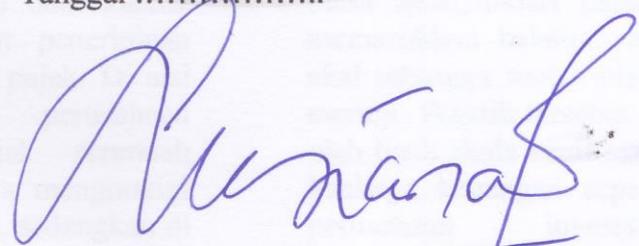
Dosen Pembimbing,

Tanggal : 26 SEPTEMBER 2018


(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 01 OKTOBER 2018


(Dr. Luciana Spica Almilia S.E., M.Si., OIA., CPSAK)

**THE EFFECT OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP, MANAGERIAL OWNERSHIP,
EXECUTIVE RISK PREFERENCE, LEVERAGE AND FIRM SIZE ON
TAX AVOIDANCE**

Larasati Eka Putri

STIE Perbanas Surabaya

E-mail: 2014310114@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

Tax Avoidance is an activity to minimize the tax expense or even eliminate taxes. This research aims to institutional ownership, managerial ownership, executive risk preference, leverage and firm size on tax avoidance. The sample used in this study is a banking company in Southeast Asia in the year 2014-2016 listed in ORBIS. The sampling technique used purposive sampling using SPSS 16 software. The result showed that institutional ownership, managerial ownership and executive risk preference had no significant effect on tax avoidance, while leverage and firm size had significant effect on tax avoidance.

Keywords : *tax avoidance, institutional ownership, managerial ownership, executive risk preference, leverage, firm size*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib bagi warga negara dan merupakan sumber penerimaan kas negara yang paling potensial. Pajak diwajibkan bagi setiap wajib pajak sebagai partisipasi masyarakat dalam membantu laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional agar tercapai kesejahteraan negara. Bagi sebagian masyarakat, pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan mereka dan tidak mendapat imbalan secara langsung saat membayar.

Pemungutan pajak merupakan fenomena yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik karena salah satu kendala dalam penerimaan pajak adalah penghindaran pajak. Di sisi wajib pajak misalnya perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak bisa mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan di sisi pemerintah menginginkan pajak

setinggi mungkin untuk membiayai program pemerintahan.

Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan. Ah Maftuchan memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplant pajak cukup besar. Kejahatan pajak dalam setahun terakhir yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara Rp10-12 Triliun. Modus yang sering digunakan adalah penghindaran pajak dengan metode rencana perpajakan agresif. Para pengelola bank dan lembaga keuangan biasa menghindari pajak badan dengan memasukkan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi. Praktik tersebut sering dilakukan oleh bank skala kecil maupun besar serta lembaga keuangan seperti asuransi dan perusahaan investasi (sumber: bisnis.tempo.co). hal ini menunjukkan

kegiatan penghindaran pajak yang masih terjadi.

Tax avoidance adalah usaha untuk meringankan beban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggunakan strategi-strategi di bidang perpajakan. *Tax avoidance* dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan penghasilan setelah pajak karena pajak dianggap sebagai unsur pengurang laba. Penghindaran pajak dapat disebut juga sebagai perencanaan pajak, dalam hal ini tidak ada suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak memperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau bahkan tidak kena pajak sama sekali. Pada penelitian ini penghindaran Pajak dihitung melalui perbandingan dari total beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak (*Current Effective Tax Rate*).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) *Current ETR* adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. Fungsi dari *Current ETR* sendiri adalah untuk mengakomodasikan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat mengukur *tax avoidance* dalam jangka pendek. Besar atau kecilnya nilai yang dihasilkan akan menentukan besarnya pajak penghasilan yang dilaporkan, jika dibandingkan semakin besar nilai yang ditunjukkan maka semakin besar beban pajak yang dilaporkan. Begitu sebaliknya, semakin kecil hasil yang ditunjukkan maka semakin sedikit beban pajak yang dilaporkan sehingga perusahaan dianggap melakukan perencanaan pajak agar beban pajak yang dibayarkan sedikit. Hal ini merupakan suatu kegiatan penghindaran pajak.

Kepemilikan institusi merupakan salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Cahyono, dkk. (2016) yang menyatakan bahwa keberadaan institusi yang

memantau secara profesional menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan. Sedangkan menurut Waluyo dkk. (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial adalah salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Pramudito dan ratnasari (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer akan mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan mendukung *tax avoidance* untuk dilakukan. Sedangkan menurut Hartadinata dan Tjaraka (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Eksekutif diduga salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan *tax avoidance* karena berperan dalam pengambilan keputusan. Keputusan diambil didasarkan atas risiko. Perilaku individu dalam menghadapi risiko dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu: 1) *Risk Averse*, yaitu perilaku individu yang takut terhadap risiko dan cenderung akan menghindari risiko. 2) *Risk Taker*, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil risiko. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* lebih berani dalam pengambilan keputusan bisnis dan biasanya memiliki motivasi untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi (Mayangsari 2015). Menurut Asri dan Suardana (2016) preferensi risiko eksekutif yang diindikasikan dengan tinggi rendahnya risiko perusahaan dapat mencerminkan preferensi risiko eksekutif perusahaan di dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

Sedangkan menurut Mayangsari (2015) preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar. *Leverage* timbul karena perusahaan dalam menjalankan operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, yaitu aktiva tetap yang menimbulkan biaya penyusutan dan utang yang menimbulkan biaya bunga (Sudana 2015:108). Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberi pengaruh berkurangnya beban pajak. Semakin besar utang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas beban bunga semakin besar. Menurut Waluyo dkk (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki hutang yang tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah, sedangkan menurut Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan semakin memiliki sumber daya yang dapat mengelola pajak dengan baik. Menurut Waluyo dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai

pengurang penghasilan kena pajak perusahaan, sedangkan penelitian dari Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Subyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Asia Tenggara pada tahun 2014-2016 yang meliputi 66 perusahaan di Indonesia, 17 perusahaan di Malaysia, 12 perusahaan di Singapura, 35 perusahaan di Thailand, 25 perusahaan Filipina, 10 perusahaan di Vietnam. Penelitian dilakukan pada periode 2014-2016 yang diharapkan dapat mempresentasikan kondisi terkini perusahaan perbankan di Asia Tenggara. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (pihak manajemen). Teori agensi menyatakan terdapat adanya pemisahan fungsi antara pemilik dengan organisasi dalam pengelolaan organisasi. Seperti yang diketahui bahwa organisasi dikelola oleh pengelola yang bukan pemilik, maka akan terjadi perbedaan keinginan, utilitas, serta kepentingan antara pengelola (*agent*) dan pemilik (*principal*) (Wilopo 2014:229). Masalah keagenan (*agency problem*) muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap (*asymetry information*) antara pengelola dan pemilik (Jensen dan Meckling 1976). Pihak agen dan prinsipal berupaya dalam mendapatkan keuntungan dimana prinsipal atau investor berupaya mendapatkan keuntungan melalui dividen yang dibagikan dan agen atau manajemen mendapatkan keuntungan atas

pengelolaan perusahaan dalam bentuk kompensasi (gaji, tunjangan dan bonus).

Masalah keagenan tidak hanya timbul antara pemilik dengan manajemen, tetapi juga bisa timbul antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, atau diantara pemegang saham dengan pihak kreditor ketika perusahaan di likuidasi (Sudana, 2015: 13). Agar pengelola organisasi melakukan tugas sesuai dengan keinginan pemilik, maka pemilik perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk pengawasan dalam kegiatan yang dilakukan pengelola, memberikan gaji dan kompensasi yang sesuai kepada pengelola dan membuat sistem pengendalian organisasi agar pengelola dapat bekerja dengan jujur. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya keagenan (*Agency Cost*) (Wilopo 2014:229). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba untuk dialokasikan ke pembagian dividen. Teori agensi mengingatkan kita bahwa sebagian besar kehidupan organisasi didasarkan pada kepentingan pribadi, oleh karena itu pentingnya insentif dan kepentingan pribadi harus dibangun dalam pemikiran organisasi (Eisenhardt 1989).

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses pengendalian tindakan untuk meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tindak kena pajak (Zain, 2003: 49).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dapat terdiri dari lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan kepemilikan lainnya. Lembaga umumnya

memberikan pengaruh yang besar terhadap manajemennya. Dengan adanya insentif untuk institusi dan kapasitas yang lebih besar untuk memantau perilaku manajer merupakan motivasi dasar untuk menggunakan kepemilikan institusional sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang berkualitas (Kholbadalov 2012).

Kepemilikan Manajerial

membuat kepentingan manajemen selaras langsung dengan kinerja perusahaan. Manajemen dan pemegang saham memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga keduanya memiliki tujuan yang sama dalam membangun perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk menentukan kualitas laba mendatang yang tercermin dari persistensi labanya, semakin pihak manajemen memiliki saham perusahaan berarti semakin besar rasa tanggungjawab manajer terhadap laporan keuangan (Jumiati dan Ratnadi 2014).

Karakteristik risiko eksekutif

merupakan karakteristik eksekutif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pengambilan keputusan didasarkan atas risiko. Risiko dibagi menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif diposisikan sebagai pihak agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen, apabila eksekutif dalam melakukan pengelolaan secara baik maka pihak prinsipal akan memberikan apresiasi mulai dari bonus hingga peningkatan gaji yang dianggap sebagai *agency cost*.

Leverage dihitung dari total utang dibagi dengan total ekuitas. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak diluar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan biasanya menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan yang baik seharusnya memiliki komposisi

modal yang lebih besar dibandingkan utang (Harahap, 2015:306).

Ukuran perusahaan merupakan perbandingan skala yang mengukur besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai proses bisnis atau pengelolaan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Besarnya aset dijadikan sebagai tolok ukur bagi prinsipal dalam melakukan kegiatan investasi.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil para manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institusional menyebabkan tingginya pengawasan ke tingkat manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang penghindaran pajak (Winata 2014).

H₁: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Peranan kepemilikan manajerial menjadi berpengaruh pada perusahaan, manajer bukan hanya berperan sebagai manajer tetapi juga sebagai pemegang saham. Hal ini membuat manajer akan lebih giat dalam memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dapat menekan

kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Zahirah, 2017).

H₂: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Eksekutif yang memiliki preferensi *risk taker* memiliki keberanian yang lebih dalam menentukan suatu kebijakan meskipun risikonya tinggi. Di antara berbagai keputusan eksekutif, terdapat keputusan penghindaran pajak perusahaan. Keputusan penghindaran pajak dapat meminimalkan beban pajak sehingga kinerja perusahaan terlihat meningkat dan manajer juga akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi karena mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Wiguna dan Jati 2017). Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berani mengambil keputusan bisnis, sedangkan eksekutif yang *risk averse* tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Mayangsari 2015).

H₃: Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak..

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut sebagai beban bunga. Untuk meminimalisir beban pajak, perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, berarti semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi akan memberi

pengaruh berkurangnya beban pajak. Semakin besar utang perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas beban bunga semakin besar (Darmawan dan Sukartha 2014).

H₄: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

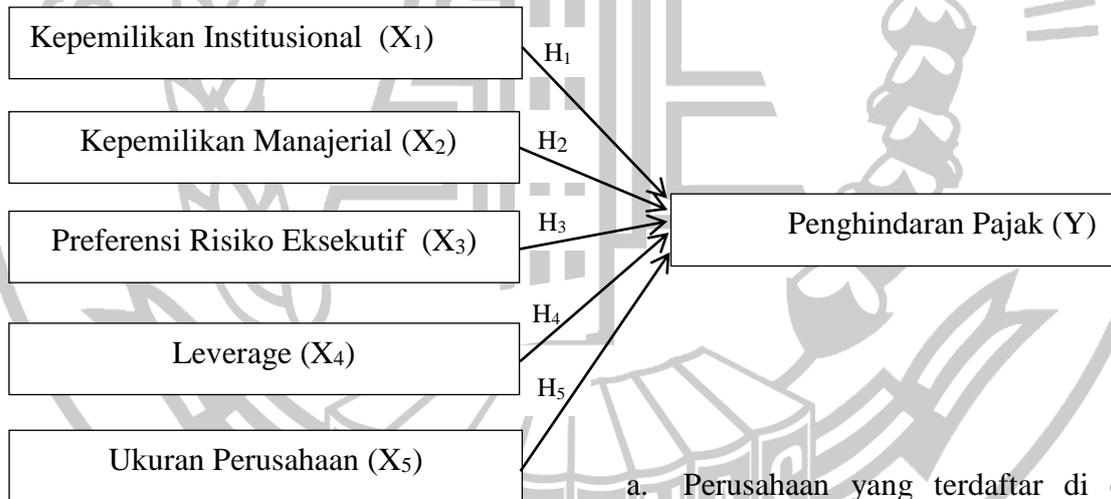
Semakin besar perusahaan maka akan semakin meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut, hal ini akan membuat laba perusahaan meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Asri dan Suardana 2016).

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Waluyo, dkk. 2014).

H₅: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan datanya bersifat sekunder yang diperoleh dari ORBIS (www.ORBIS.bvindo.com) dan *annual report* yang terdapat pada *website* resmi perusahaan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

- a. Perusahaan yang terdaftar di orbis pada periode 2014-2016.
- b. Perusahaan yang memiliki laba pada periode pengamatan.
- c. Perusahaan mempunyai data lengkap yang dibutuhkan peneliti.

Pada penelitian ini termasuk penelitian dasar dengan pendekatan deduktif sesuai dengan karakteristik penelitiannya yang menggunakan penelitian arsip sebagai karakteristik masalah pada penelitian ini.

Batasan Penelitian

Adapun batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data yang digunakan yaitu periode 2014-2016 dengan populasi sampel penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di ORBIS
- b. Jenis variabel berfokus pada lima variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak.
- c. Perusahaan sektor perbankan dengan kondisi perusahaannya laba sebelum pajak maupun setelah pajak.
- d. *Annual report* tersedia dan disusun dengan menggunakan bahasa internasional dan menggunakan kurs yang terdapat di ORBIS.

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen yaitu:

1. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak
2. Variabel Independen:
 - a. Kepemilikan Institusional
 - b. Kepemilikan Manajerial
 - c. Preferensi Risiko Eksekutif
 - d. *Leverage*
 - e. Ukuran Perusahaan

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan model *Current Effective Tax Rate (Current ETR)*. Semakin tinggi presentase *Current ETR* menunjukkan semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya semakin rendah presentase *Current ETR* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. *Current ETR* dalam penelitian dapat dihitung dengan rumus (Hanlon dan Heitzman 2010):

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Income tax Expense}}{\text{Total Pre-Tax Accounting Income}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional berfungsi untuk memantau perkembangan investasi secara profesional sehingga menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi. Kepemilikan institusional diukur dengan (Cahyono, dkk. 2016):

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham pihak institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

Kepemilikan Manajerial

Sebagai seorang manajer dan pemegang saham akan menyelaraskan kepentingan para pemegang saham dan manajer dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan saham, manajemen akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambilnya, demikian juga kerugian yang timbul apabila mengambil keputusan yang salah (Zahirah, 2017). Kepemilikan manajerial diukur dengan (Amelia, dkk. 2017):

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham milik manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko dapat dibedakan menjadi *risk taker* dan *risk averse* dengan cara mengukur risiko perusahaan yang dipimpinnya. Risiko perusahaan yang besar menunjukkan eksekutif memiliki preferensi *risk taking* dan begitu juga sebaliknya (Mayangsari 2015). Preferensi risiko eksekutif dapat dihitung dengan rumus (Hanafi dan Harto, 2014):

$$Risk = \sqrt{\sum_{t=1}^T \left(E - 1/T \sum_{t=1}^T E \right)^2} / (T - 1)$$

Keterangan :

E = EBITDA (*Earning before interest, tax, depresiasi, amortisasi*) / Total Aset

T = Total Sampel

Leverage

Menurut Harahap (2015: 306) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar. Pengukuran leverage dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Besar kecilnya rasio *leverage* dapat diukur dengan cara (Mayangsari 2015):

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, diantaranya adalah: total aset, *log size*, penjualan, kapitalisasi pasar dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki. Ukuran

perusahaan pada penelitian ini diukur dengan rumus (Amelia, dkk. 2017):

$$SIZE = \text{Ln (Total Aset)}$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor perbankan yang tersedia di ORBIS selama periode 2014-2016.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara jenuh *sampling* atau sampel yang mewakili jumlah populasi dari setiap perusahaan perbankan di beberapa negara yang termasuk dalam Asia Tenggara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan Pengujian Hipotesis.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah pengujian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Dalam analisis statistik deskriptif informasi yang dihasilkan berupa *mean*, standar deviasi, maksimum, minimum.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean
Perencanaan Pajak	-0,056492	0,462557	0,206614
Kepemilikan Instiusional	0,028655	0,998785	0,614184
Kepemilikan Manajerial	0,00000012	0,719048	0,053049
Preferensi Risiko Eksekutif	0,000093	0,087429	0,006568
Leverage	0,007261	15,380086	5,496226
Ukuran Perusahaan	15,514639	26,532936	21,792942

Penghindaran pajak pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum sebesar -0,056492 yang dimiliki oleh Seamico Securities Public Company Limited pada tahun 2015. Nilai minimum menunjukkan bahwa beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah, nilai negatif menunjukkan bahwa beban pajak bersifat positif atau menambah net profit, sedangkan nilai maksimum penghindaran pajak sebesar 0,462557 yang dimiliki oleh perusahaan perbankan di Indonesia yaitu PT. Bank Agris pada tahun 2015. Nilai maksimum diartikan bahwa beban pajak yang dibayarkan perusahaan tinggi.

Kepemilikan Institusional pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum sebesar 0,028655 yang dimiliki oleh Muangthai Leasing Public Company pada tahun 2015, sehingga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional paling rendah selama periode 2014-2016. Rendahnya kepemilikan institusional mengindikasikan rendahnya pengawasan terhadap pihak manajemen dan rendahnya wewenang yang dimiliki oleh para pemegang saham. Nilai maksimum sebesar 0,998785 dimiliki oleh Asia United Bank pada tahun 2016, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional paling tinggi selama periode 2014-2016. Tingginya tingkat kepemilikan institusional mengindikasikan bahwa pemegang saham memiliki wewenang dalam perusahaan, sehingga pemegang saham dapat melakukan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen.

Kepemilikan manajerial pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum sebesar 0,00000012 dimiliki oleh Krungthai Bank Public Company pada tahun 2015, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

merupakan perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan manajerial paling rendah. Rendahnya kepemilikan manajerial juga menyebabkan rendahnya rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga akan menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Nilai maksimum sebesar 0,719048 dimiliki oleh Muangthai Leasing Public Company pada tahun 2015, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial paling tinggi. Tingginya kepemilikan saham mengindikasikan bahwa manajemen memiliki wewenang dalam mengendalikan perusahaan dan juga mengakibatkan tingginya rasa memiliki manajemen terhadap perusahaan yang membuat manajemen lebih bertanggungjawab. Hal tersebut memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini membuat pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan perusahaan.

Preferensi risiko eksekutif pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum sebesar 0,000093 yang dimiliki oleh Rachtani Leasing Public Company Limited pada tahun 2014. Nilai minimum menunjukkan eksekutif yang bersifat *risk averse*. *Risk Averse* diartikan sebagai eksekutif yang cenderung kurang berani dalam mengambil risiko, *risk averse* dimiliki oleh 226 sampel dari total keseluruhan 250 sampel. Nilai maksimum sebesar 0,087429 dimiliki oleh GT Capital Holdings Incorporated pada tahun 2016, sehingga menunjukkan eksekutif yang bersifat *risk taker*. *Risk Taker* diartikan sebagai eksekutif yang cenderung menyukai risiko, *risk taker* sendiri dimiliki oleh 24 sampel dari total keseluruhan 250 sampel.

Leverage pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum 0,007261 yang dimiliki oleh Victoria Investama pada tahun 2016. Nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola hutang dengan baik untuk proses bisnis dalam meningkatkan pendapatan. Rendahnya total hutang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan modal daripada hutang dalam setiap aktivitas operasinya. Nilai maksimum sebesar 15,380086 dimiliki oleh Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam - Vietcombank pada tahun 2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu mengelola dan memanfaatkan hutang dalam berlangsungnya proses bisnis. Tingginya total hutang perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan hutang dalam setiap aktivitas operasinya.

Ukuran perusahaan pada analisis deskriptif pada tabel 1 memiliki nilai minimum sebesar 15,514639 dimiliki oleh Filipino Fund Incorporated pada tahun 2014 yang memiliki total aset sebesar \$5.469.179. Nilai minimum mengindikasikan bahwa aktivitas operasi perusahaan rendah. Perusahaan kecil cenderung tidak memiliki aset dalam jumlah besar dan semakin sedikit juga sumber daya yang dimiliki untuk mengelola perusahaan dengan baik.

Nilai maksimum sebesar 26,532936 yang dimiliki oleh DBS Group Holdings pada tahun 2014 yang memiliki total aset sebesar \$333.509.248.780. Nilai maksimum diartikan bahwa aktivitas operasi perusahaan tinggi. Hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Perusahaan besar juga cenderung memiliki sumber daya yang dapat mengelola perusahaan dengan baik.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak dari model regresi pada variabel sehingga statistik lebih valid. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov. Jika hasil signifikansi dari kolmogorov-smirnov menunjukkan $\geq 5\%$ atau 0,05 maka data yang diuji berdistribusi normal, namun jika hasil signifikansi dari kolmogorov-smirnov $< 5\%$ atau 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,080 > 0,05$ sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada kemiripan yang menyebabkan terjadinya kolinearitas dalam satu model antara variabel independen satu dengan lainnya. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan perhitungan *variance inflation factor (VIF)* dan *tolerance value* setiap independen. Apabila, *variance inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance value (TV)* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 0,918, kepemilikan manajerial sebesar 0,875, preferensi risiko eksekutif sebesar 0,842, *leverage* sebesar 0,504 dan ukuran perusahaan sebesar 0,485. Nilai TV menunjukkan lebih besar dari 0,10. Nilai VIF untuk variabel kepemilikan institusional sebesar 1,090, kepemilikan manajerial sebesar 1,143, preferensi risiko eksekutif sebesar 1,188, *leverage* sebesar 1,984 dan ukuran perusahaan sebesar 2,060. Nilai VIF menunjukkan kurang

dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi penyimpangan variabel yang bersifat konstan atau tidak. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah uji *glejser*. Pada model regresi bebas dari heteroskedastitas apabila variabel independen bersifat tidak signifikan atau memiliki nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kepemilikan institusional sebesar 0,160, kepemilikan manajerial sebesar 0,051, preferensi risiko eksekutif sebesar 0,009, *leverage* sebesar 0,162 dan ukuran perusahaan sebesar 0,039 dimana menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan kurang dari 0,05 dan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage* diatas 0,05 yang artinya terjadi heteroskedastisitas pada preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *leverage* tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Run Test*. Jika hasil uji menunjukkan $\geq 5\%$ atau 0,05 maka data yang diuji menunjukan tidak terjadi autokorelasi, namun jika hasil uji menunjukkan $< 5\%$ atau 0,05 maka data terjadi autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi menunjukkan sebesar 0,008 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Model regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cu-ETR} = 0,312 + 0,031\text{INOWN} - 0,026\text{MANOWN} + 0,030\text{PRE} + 0,009\text{DER} - 0,008\text{SIZE} + e$$

Keterangan :

- Cu-ETR : Penghindaran Pajak
- INOWN : Kepemilikan Institusional
- MAOWN : Kepemilikan Manajerial
- PRE : Preferensi Risiko Eksekutif
- DER : *Leverage*
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- e : *Error*

Uji Hipotesis

Uji Statistik F

Pada penelitian ini uji statistik f digunakan untuk menunjukkan apakah model refresi fit atau tidak fit. Apabila hasil uji menunjukkan nilai $\geq 5\%$ atau 0,05 model dikatakan tidak fit dan apabila hasil uji menunjukkan nilai $\text{sig-F} < 5\%$ atau 0,05 model dikatakan fit dan dapat dilanjutkan ke tahap uji selanjutnya.

Hasil uji F menunjukkan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dinyatakan bahwa model regresi fit dan model regresi dinyatakan H_0 ditolak sehingga dapat digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel penghindaran pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan) dalam menerangkan variasi variabel dependen (penghindaran pajak). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1. Apabila nilai determinasi kecil atau mendekati 0 maka kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen dan jika nilai determinasi mendekati 1 maka variabel dependen mampu diberikan oleh variabel independen.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sebesar 0,071 atau sebesar 7,1% yang berarti bahwa kemampuan variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan) dalam menerangkan variasi variabel dependen (penghindaran pajak). dan sisanya sebesar 92,9% diterangkan oleh variabel diluar penelitian. Nilai mendekati 0 yang artinya kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel independen (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage* dan ukuran perusahaan) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Jika tingkat

signifikansi menunjukkan $< 5\%$ atau $0,05$ maka terdapat pengaruh antara variabel independen dengan dependennya. Berikut dijelaskan hasil uji statistik t:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar 1,405 dengan signifikasi sebesar 0,161. Tingkat signifikasi sebesar $0,161 > 0,05$ yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_0 diterima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar -0,539 dengan signifikasi sebesar $0,591 > 0,05$ yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_0 diterima.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar 1,599 dengan signifikasi sebesar $0,111 > 0,05$ yang berarti preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_0 diterima.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dilakukan untuk menguji *leverage* penghindaran pajak. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar 4,393 dengan signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_0 ditolak.

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima dilakukan untuk menguji ukuran perusahaan terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan tabel diatas nilai t sebesar -2,713 dengan signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H_0 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Pada hasil analisis uji t menggunakan regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional belum mampu melakukan pengendalian secara kuat untuk mengarahkan dan mengawasi manajer yang berperan sebagai agen agar bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. Pemegang saham tidak memungkinkan untuk mengawasi perusahaan secara langsung sehingga para pemegang saham sudah mempercayakan kepada pihak ketiga, seperti dewan komisaris.

Dewan komisaris sendiri dibentuk oleh para pemegang saham dan tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan agar dapat meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen. Pemegang saham sudah mengeluarkan biaya agensi untuk mengurangi *agency problem*. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat masalah agensi dapat diminimalisir, walaupun pemegang saham sudah berupaya maksimal untuk menekan masalah agensi.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan. Adanya pihak institusi membuat pengawasan terhadap manajemen lebih tinggi dan optimal agar bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan tidak

melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat mengurangi konflik keagenan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Waluyo, Basri dan Rusli (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Pada hasil analisis uji t menggunakan regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Apabila dilihat dari data sampel, proporsi kepemilikan manajerial secara keseluruhan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pihak eksternal. Kepemilikan saham manajerial yang rendah atau lebih sedikit dari pihak eksternal membuat manajer tidak mempunyai rasa memiliki perusahaan yang membuat manajemen kurang bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dan lebih mementingkan bonus yang didapat. Ada beberapa perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial tinggi akan tetapi tingkat penghindaran pajak yang dilakukannya juga semakin tinggi.

Adanya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan tidak mampu mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, padahal dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan pihak agen dan prinsipal memiliki kedudukan yang sejajar sehingga manajemen dan pemegang sama memiliki tujuan yang samadalam membangun perusahaan. Dapat disimpulkan tinggi

rendahnya proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, manajemen bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan apalagi saat manajemen berperan ganda sebagai pemegang saham juga. Adanya kepemilikan manajerial membuat pihak manajemen merasa memiliki sebagian perusahaan sehingga lebih bertanggungjawab terhadap perusahaan. Hal ini dapat mengurangi konflik keagenan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hartadinata dan Tjaraka (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian Chan, Mo dan Zhou (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Pada hasil analisis uji t hasil menunjukan bahwa preferensi risiko eksekutif bersifat *risk averse* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya risiko dalam menjalankan strategi kebijakan perusahaan akan membuat eksekutif memperhatikan dampak yang akan terjadi dari setiap keputusan yang dibuatnya. Berdasarkan data sampel terdapat 226 sampel memiliki eksekutif yang cenderung *risk averse* dan 24 perusahaan memiliki eksekutif yang cenderung *risk taker*. *Risk averse* mendominasi 226 sampel dari total keseluruhan 250 sampel yang berarti eksekutif cenderung tidak berani menghadapi risiko dalam setiap pengambilan keputusan termasuk risiko dalam kegiatan penghindaran pajak.

Risiko mampu memberikan dampak terhadap eksekutif dalam pengambilan keputusan akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Eksekutif khawatir akan merugikan perusahaan dan merusak nama baik perusahaan dari publik dan para investor. Apalagi dalam perusahaan perbankan nasabah merupakan sumber dana perusahaan, apabila nama baik perusahaan tercoreng nasabah tidak berani lagi berinvestasi di perusahaan tersebut. Begitu juga dengan para investor, mereka tidak berani lagi menanamkan sahamnya pada perusahaan yang bermasalah.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, eksekutif bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan. Eksekutif menganalisis dampak yang terjadi dari suatu tindakan untuk mendapatkan keputusan terbaik, sebagai agen eksekutif memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan perusahaan melalui keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang akan timbul. Hal ini dapat mengurangi konflik keagenan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) yang menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Suadana (2016) yang menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Pada hasil analisis uji t menggunakan regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil menunjukkan semakin

tinggi rasio leverage maka semakin tinggi juga nilai *current effective tax rate* (CuETR) sehingga dapat dikatakan semakin tinggi *leverage* perusahaan semakin rendah kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang berhutang akan memberikan hasil kinerja yang baik yang dibuktikan dari perolehan laba yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak berhutang (Hartadinata dan Tjaraka, 2013).

Perusahaan perbankan sumber dananya berasal dari hutang, karena tabungan dan giro dari nasabah berdampak di hutang. Semakin tinggi hutang, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mengelola hutangnya dengan cara meminjamkan dana kepada nasabah sehingga akan berdampak pada pendapatan bunga. Semakin tinggi pendapatan bunga akan berdampak pada laba yang tinggi, laba yang tinggi membuat beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Beban pajak yang tinggi mengindikasikan pembayaran pajak perusahaan lebih transparan. Tingginya tingkat *leverage* akan menyebabkan rendahnya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dapat disimpulkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan menggunakan hutang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Laba yang besar menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Laba yang besar dapat menarik investor, sesuai dengan keinginan prinsipal. Hal ini dapat mengurangi konflik keagenan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Basri dan Rusli (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Pada hasil analisis uji t hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin besar total aset perusahaan menunjukkan perusahaan memiliki kinerja yang baik, perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya untuk melakukan pengelolaan pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Sumber daya manusia yang ahli mengenai perpajakan diperlukan untuk pengelolaan pajak perusahaan sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan lebih memilih aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam kegiatan penghindaran pajak.

Menurut Suandy (2016: 42) penentuan metode penyusutan yang tepat penting dalam kegiatan perencanaan pajak, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Jika perusahaan memiliki prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun. Dengan menggunakan metode penyusutan tersebut, perusahaan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak dan dapat menekan beban pajaknya. Revaluasi aset tetap juga dapat dilakukan perusahaan dalam kegiatan perencanaan pajaknya. Revaluasi aset tetap membuat perusahaan mendapatkan tambahan beban penyusutan yang bisa menjadi faktor pengurang laba fiskal. Apabila laba yang diperoleh perusahaan sedikit maka beban pajak yang harus dibayarkan juga sedikit.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, ukuran perusahaan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh pihak prinsipal dalam melakukan kegiatan investasi. Semakin besar aset suatu perusahaan maka menunjukkan perusahaan dapat mengelola aset dengan baik. Semakin tinggi aset dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba yang tinggi mampu menarik perhatian investor. Pihak agen akan berusaha untuk mendapatkan laba agar pihak prinsipal tidak merasa dirugikan setelah melakukan investasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji pengaruh antara variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan variabel dependen penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di kawasan Asia Tenggara pada periode 2014-2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang didapat dari *website* masing-masing perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel awal penelitian sebanyak 501 sampel yang terdiri dari 167 perusahaan selama periode 2014-2016. Adanya 39 perusahaan yang mengalami laba negatif dan 203 sampel yang tidak memiliki data

lengkap yang dibutuhkan peneliti dalam periode 2014-2016, sehingga data yang siap diolah menjadi 259 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.
3. Preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
4. *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.
5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian tidak memenuhi uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.
2. Adanya laporan keuangan yang tidak menggunakan bahasa internasional.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran lain sebagai proksi penghindaran pajak, seperti *Book Tax Differences*, *Cash Effective Tax Rate*, dan lain lain.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lainnya seperti dewan komisaris, komisaris independen, gender direksi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel perusahaan lain.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang tahun penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, Mella Virgi, Dudi Pratomo, dan Kurnia. 2017. "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *e-Proceeding of Management* 4 (2): 1510.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi, dan Ketut Alit Suardana. 2016. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 72-100.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan

Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013." *Journal Of Accounting* 2 (2).

Chan, K. Hung, Phyllis L. L. Mo, dan Amy Y. Zhou. 2013. "Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China." *Accounting and Finance* 53: 1029-1051.

Darmawan, I Gede Hendy, dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9 (1): 143-161.

Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *The Academy of Management Review* 14 (1): 57-74.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hanafi, Umi, dan Puji Harto. 2014. "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal Of Accounting* 3 (2): 1-11.

Hanlon, Michelle, dan Shane Heitzman. 2010. "A Review of Tax Research." *Journal of Accounting and Economics* 50: 127-178.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Hartadinata, Okta S., dan Heru Tjaraka. 2013. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Aggresiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (3).
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economic* 3 (4): 305-360.
- Jumiati, Fitria, dan Ni Made Dwi Ratnadi. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Book Tax Difference pada Persistensi Laba." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8 (2): 91-101.
- Kholbadalov, Utkir. 2012. "The relationship of corporate tax avoidance, cost of debt and institutional ownership: evidence from Malaysia." *Atlantic Review of Economics* 2.
- Mayangsari, Cindy. 2015. "Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jom FEKON* 2 (2).
- Praditasari, Ni Koming Ayu, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (2): 1229-1258.
- Pramudito, Batara Wiryo, dan Maria M. Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13 (3): 705-722.
- Sudana, I Made. 2015. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Tempo.co. 2014. *bisnis.tempo.co*. 26 April. <https://bisnis.tempo.co/read/573319/begini-modus-penggelapan-pajak-sektor-keuangan/full&view=ok>.
- Waluyo, Teguh Muji, Yessi Mutia Basri, dan Rusli. 2014. "Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak." *Simposium Nasional Akuntansi Medan* 18 (160).
- Wiguna, I Putu Putra, dan I Ketut Jati. 2017. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21 (1): 418-446.
- Wilopo, Romanus. 2014. *Etika Profesi Akuntan: Kasus-Kasus di Indonesia*. Surabaya: STIE Perbanas Press.
- Winata, Fenny. 2014. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar Di Burse Efek Indonesia Tahun 2013." *Tax & Accounting Review* 4 (1).
- Zahirah, Azizah. 2017. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak." *JOM Fekon* 4 (1).

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

www.ORBIS.bvindo.com

